

---

---

## Gerakan Penghapusan MOGEF di Korea Selatan oleh People Power Party (PPP) sebagai *Political Branding*

Sang Ayu Nyoman Ratih Vikanaswari<sup>1)</sup>, Putu Titah Kawitri Resen<sup>2)</sup>, Putu Ratih Kumala Dewi<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Udayana.

---

### Abstrak

Penghapusan MOGEF – Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga – sebagai satu kementerian di pemerintahan Korea Selatan menjadi isu yang diperdebatkan dalam perpolitikan Korea Selatan. Isu ini muncul dikarenakan kinerja MOGEF yang dianggap tidak efektif dan tidak menciptakan kesetaraan gender sebagaimana mestinya. Banyak yang menganggap isu ini sebagai bentuk gerakan anti feminisme, dikarenakan penghapusan MOGEF sama dengan tidak mendukung adanya kesetaraan gender di Korea Selatan. Isu ini kemudian digunakan oleh People Power Party sebagai kampanye dalam Pemilu 2022, untuk menaikkan suara dukungan mereka, terutama dari golongan pria muda yang pro dengan isu tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk mencari tahu dan menjelaskan bagaimana PPP menggunakan gerakan penghapusan MOGEF sebagai *political branding*, menggunakan konsep anti feminisme, *countermovement*, dan *political branding*. Penelitian ini disusun dengan metode penelitian kualitatif, untuk dapat memahami bagaimana pendekatan aktor terhadap suatu isu. Dengan metode penelitian tersebut, penelitian ini dapat menjabarkan isu anti feminisme sebagai *countermovement*, dan keterkaitannya dengan *political branding* suatu aktor politik. Dari penelitian tersebut, disimpulkan bahwa calon presiden Yoon Seok-yeol dari PPP menggunakan isu penghapusan MOGEF dalam kampanyenya, yang menjadikannya berhasil memenangkan Pemilu 2022.

**Kata-kunci** : Anti feminisme, *Countermovement*, MOGEF, *Political Branding*, PPP.

---

### Abstract

*The abolition of MOGEF – Ministry of Gender Equality and Family – as a ministry in South Korea governance has become a debatable issue in South Korean politics. This issue emerged as a result of MOGEF's performance being viewed as ineffective and failing to properly promote gender equality. Since abolishing MOGEF is equivalent to opposing gender equality in South Korea, many see this issue as an anti-feminist campaign. The People Power Party (PPP) then used this topic as a campaign platform in the 2022 election, particularly with young men who support this subject. The purpose of this research is to determine and clarify how PPP uses the campaign to outlaw MOGEF as a political branding tool, using the concepts of anti-feminism, countermovement, and political branding. To comprehend how actors approach a problem, this research was prepared utilizing qualitative research approaches. Using this research methodology, the study can clarify the issue of anti-feminism as countermovement and how it relates to a political actor's*

*political branding. From the research, it is concluded that the presidential candidate Yoon Seok-yeol of PPP had been using the MOGEF abolition issue in his campaign, leading to his victory in 2022 election.*

**Keywords** : *Antifeminism, Countermovement, MOGEF, Political Branding, PPP.*

---

**Kontak Penulis**

Sang Ayu Nyoman Ratih Vikanaswari

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Udayana.

Jl. Nenas no. 3 Denpasar, Bali. 80231

Telp: +6285156255827 Fax:-

E-mail : [ratihvikanaprkr@gmail.com](mailto:ratihvikanaprkr@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga (Ministry of Gender Equality and Family atau MOGEF) adalah kementerian yang dibentuk oleh pemerintah Korea Selatan pada tahun 2001 sebagai bentuk kesadaran terhadap isu-isu kesetaraan gender. Dibentuknya MOGEF di Korea Selatan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam isu kesetaraan gender di Korea Selatan, dimana negara ini masih rentan dengan isu diskriminasi gender, khususnya perempuan. Salah satu bentuk nyata diskriminasi yang dialami perempuan Korea Selatan adalah diskriminasi di lingkungan kerja, mulai dari kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki, hingga sedikitnya persentase perempuan yang menempati jajaran eksekutif dalam perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan.

Keberadaan MOGEF sebagai suatu kementerian yang bergerak dalam perjuangan kesetaraan gender berperan penting terhadap isu-isu yang dialami oleh perempuan yang terdiskriminasi di masyarakat Korea Selatan. Namun, upaya perjuangan kesetaraan gender menghadapi tantangan besar di masyarakat. Salah satu tantangan tersebut adalah patriarki yang masih sangat melekat di masyarakat Korea Selatan, dimana sistem patriarki menempatkan laki-laki dalam posisi yang lebih tinggi dari perempuan. Selain itu, gerakan feminisme yang memperjuangkan kesetaraan gender juga dianggap tabu oleh masyarakat Korea Selatan. Gerakan yang menentang feminisme ini disebut sebagai anti feminisme, dimana para anti feminis di Korea Selatan mayoritas adalah golongan laki-laki muda.

Isu anti feminisme menjadi salah satu isu yang terjadi di Korea Selatan. Dengan banyaknya laki-laki muda yang anti feminis, permasalahan serta kebijakan pemerintah terkait kesetaraan gender menjadi suatu pro dan kontra dalam masyarakat. Salah satu isu yang muncul adalah

penghapusan MOGEF sebagai suatu kementerian di pemerintahan Korea Selatan. Gagasan ini disampaikan oleh politisi dari People Power Party (PPP), yaitu Representatif Yoo Seong-min dan Ha Tae-keung. Isu penghapusan MOGEF tersebut dikarenakan MOGEF dianggap tidak melakukan tugasnya dengan baik, dan malah menciptakan konflik gender di Korea Selatan. Yoo berpendapat bahwa “pekerjaan yang dilakukan MOGEF dapat dilakukan oleh lembaga pemerintahan lainnya”, sementara menurut Ha, “MOGEF telah mendorong konflik gender daripada mendorong kesetaraan dan harmoni gender” (Bahk, 2021). Kemudian, proposal penghapusan MOGEF tersebut didukung oleh Ketua PPP Lee Jun-seok, sehingga gagasan tersebut kemudian dapat dijadikan kampanye utama calon presiden dari PPP.

Kampanye penghapusan MOGEF kemudian menjadi kampanye dari calon presiden Yoon Seok-yeol yang diusung oleh PPP. PPP merupakan partai konservatif Korea Selatan yang mengalami kemunduran elektabilitas pasca skandal korupsi mantan presiden Park Geun-hye. Dengan kampanye tersebut, Yoon sekaligus PPP melakukan *political branding* dengan menggunakan isu penghapusan MOGEF untuk menarik dukungan, khususnya dari golongan laki-laki muda. Isu penghapusan MOGEF menuai pro dan kontra di masyarakat Korea Selatan, sehingga penggunaan isu tersebut sebagai kampanye calon presiden PPP dapat dikatakan sebagai *political branding* melihat tidak sedikit yang setuju dengan penghapusan MOGEF, serta PPP yang membutuhkan suara dukungan.

Penulisan jurnal ini ditujukan untuk menjelaskan bagaimana PPP menggunakan isu penghapusan MOGEF sebagai *political branding*. Penggunaan isu MOGEF sebagai *political branding* oleh PPP dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep anti feminisme, *political*

*branding*, dan anti feminisme sebagai *political branding*.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif mencari tahu dan memahami bagaimana suatu individu atau kelompok memaknai permasalahan sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2013). Unit analisis dari penelitian ini adalah partai politik PPP, dengan sumber data dari data sekunder, yang berupa jurnal serta karya ilmiah terdahulu dengan topik terkait, serta kumpulan berita web yang memiliki kredibilitas. Data penelitian ini akan disajikan secara interpretatif, yaitu memberikan makna terhadap data yang sudah dikumpul dan disusun kembali untuk menyatukan seluruh analisis dan mencapai suatu hasil (Yin, 2011).

Dengan metode tersebut, penulis berfokus pada penggunaan isu penghapusan MOGEF dalam kampanye calon presiden dari PPP yaitu Yoon Seok-yeol sebagai *political branding* dan menjelaskannya secara interpretatif berdasarkan hasil pengolahan data-data yang dimiliki penulis sebagaimana yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### MOGEF sebagai Institusi Kesetaraan Gender di Korea Selatan

MOGEF atau Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga dibentuk pada tahun 2001 pada masa pemerintahan Presiden Kim Dae-jung. Tujuan awal dari pembentukan MOGEF adalah mengawasi isu-isu terkait dengan status perempuan, pencegahan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, serta pencegahan diskriminasi gender. Pada saat MOGEF dibentuk, tugas-tugas yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga,

pencegahan perdagangan seks, serta dukungan untuk penghidupan para korban wanita penghibur militer Jepang, dialihkan dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan. Selain itu, tugas-tugas yang berkaitan dengan Pengembangan Sumber Daya Perempuan dialihkan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Sejak pembentukannya pada tahun 2001, MOGEF telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait kesetaraan gender, hak-hak perempuan dan kesejahteraan keluarga. Salah satu kebijakan MOGEF yaitu pengembangan dan implementasi *The 2nd Framework Plan for Gender Equality Policies*, dimana kebijakan tersebut berlatar belakang penyusunan "*Basic Plan for Gender Equality Policies*" setiap lima tahun untuk mewujudkan kesetaraan gender secara lebih praktis dengan mengatasi kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mempromosikan kesadaran matang tentang kesetaraan gender, mencapai keseimbangan kehidupan kerja, meningkatkan kesehatan dan keselamatan perempuan, serta meningkatkan kesempatan kerja dan partisipasi sosial perempuan<sup>1</sup>.

Peran MOGEF terhadap isu kekerasan seksual dapat dilihat pada kasus "*Nth Room*", yang merupakan kasus eksploitasi seksual melalui ruang obrolan dalam aplikasi Telegram. Dalam ruang obrolan tersebut berisi perdagangan konten-konten seksual banyak perempuan, termasuk yang dibawah umur. Para korban harus menuruti permintaan para pengguna ruang obrolan tersebut, bahkan permintaan yang sudah termasuk ekstrem. Mereka tidak dapat melaporkan kejadian tersebut dikarenakan adanya pemerasan terhadap mereka menggunakan data pribadi mereka.

<sup>1</sup> MOGEF *official website*.

[https://www.mogef.go.kr/eng/am/eng\\_am\\_f005.do](https://www.mogef.go.kr/eng/am/eng_am_f005.do).

Diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

Sekitar 260.000 pengguna membayar menggunakan *cryptocurrency* atau konten-konten yang mereka miliki untuk bergabung dalam ruang obrolan tersebut (Handayani, 2020). MOGEF merespons kasus tersebut dengan membentuk GENDER ON, yang merupakan platform kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan. Platform ini dibentuk MOGEF dibawah naungan Korean Gender Institute for Gender Equality Promotion & Education (KIGEPE). Tujuan dibentuknya platform GENDER ON yaitu membagikan konten-konten edukasi mengenai kesetaraan gender & pencegahan kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Selain GENDER ON, MOGEF juga mengajukan proposal 'langkah-langkah baru untuk memberantas kejahatan seksual digital. Langkah-langkah tersebut berisi: hukuman yang lebih berat untuk materi pelecehan seksual terhadap anak dan remaja, penerapan standar hukuman baru untuk kejahatan seks digital, serta penyitaan hasil kejahatan seks digital, hukuman baru yang diberlakukan untuk pelaku *online grooming*<sup>2</sup>, peningkatan usia persetujuan untuk 'pemeriksaan karena kelalaian' yang melibatkan anak dibawah umur, serta pengenalan investigasi rahasia, sistem pelaporan dan penghargaan, hukuman denda, dan lain-lain (Woon, 2020).

Meskipun MOGEF telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga dan pemuda, beberapa pihak menganggap kementerian ini masih memiliki kekurangan. Salah satu permasalahan yang dimiliki MOGEF yaitu nama kementerian ini dalam

Bahasa Korea, yaitu 여성가족부<sup>3</sup>, yang lebih tepat diterjemahkan sebagai 'Kementerian Perempuan dan Keluarga'. Dikarenakan terjemahan tersebut, MOGEF mendapatkan serangan serta argumen dari anti feminis bahwa laki-laki Korea Selatan menghadapi diskriminasi karena MOGEF hanya melayani kebutuhan perempuan. Selain itu, beberapa kebijakan yang dikeluarkan MOGEF juga menuai pro dan kontra di masyarakat, terlebih dengan sentimen masyarakat yang melihat MOGEF sebagai Kementerian yang hanya berpihak kepada perempuan. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, muncul wacana penghapusan MOGEF dikarenakan ketidakefektifannya dalam menangani permasalahan kesetaraan gender. Isu penghapusan MOGEF yang pada awalnya dicetuskan oleh Representatif Yoo Seong-min dan Ha Tae-keung dari PPP, kemudian disetujui oleh Ketua PPP Lee Jun-seok menjadi kampanye utama calon presiden dari partai tersebut.

### Anti Feminisme di Korea Selatan

Munculnya isu anti feminisme masih berkaitan dengan kemunculan isu feminisme. Feminisme merupakan gerakan yang muncul untuk memperjuangkan kesetaraan gender serta hak perempuan. Gerakan ini pada awalnya bertujuan untuk membuka kesempatan bagi perempuan untuk partisipasi sosial maupun politik. Namun, feminisme sering disalahpahami sebagai gerakan untuk membenci pria. Dikarenakan salah paham tersebut, tidak sedikit yang menentang feminisme.

Salah satu faktor kemunculan anti feminisme di Korea Selatan adalah sistem patriarki yang masih melekat di masyarakat Korea Selatan. Patriarki yang masih melekat di Korea Selatan dipengaruhi oleh kepercayaan Konfusianisme yang dianut oleh sebagian besar negara-negara

<sup>2</sup> Tindakan orang dewasa yang menggunakan internet untuk membangun hubungan dengan orang yang masih muda, dengan intensi untuk mengelabui, menekan, atau memaksa mereka untuk melakukan hal-hal seksual, seperti mengirim gambar atau video mereka.

<sup>3</sup> Dibaca 'Yeosong-gajogbu'

di Asia Timur, termasuk Korea Selatan. Konfusianisme memiliki pengaruh besar dalam kebudayaan Asia Timur, dimana patriarki juga menjadi bagian dari kebudayaan. Feminis Korea menganggap Konfusianisme menentang kesetaraan gender dan mengadvokasi patriarki (Koh, 2008). Dari sudut pandang mereka, subordinasi perempuan terhadap laki-laki berdasarkan tradisi patriarkal, dimana laki-laki memiliki kekuasaan atas keluarga, komunitas, dan masyarakat. Melihat dari sisi ini, Konfusianisme dan kesetaraan gender, menjadi dua hal yang tidak dapat disatukan, sehingga feminisme tidak mudah diterima oleh masyarakat Korea Selatan. Feminisme dianggap menjadi ancaman bagi laki-laki, dimana mereka menganggap feminisme menjadikan mereka didiskriminasi oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Upaya feminisme dalam menyetarakan gender disalahpahami sebagai upaya untuk menggeser dominasi laki-laki dalam masyarakat.

Penolakan terhadap feminisme juga dipicu oleh adanya feminisme radikal. Feminisme radikal memulai gerakan militan, seperti *'The 4B Movements'* yang berarti tidak berkencan (*biyeonae*), tidak menikah (*bihon*), tidak berhubungan seksual (*bisekseu*), dan tidak mempunyai keturunan (*bichulsan*). Gerakan tersebut berfokus untuk menentang pernikahan dan relasi heteroseksual yang banyak dianut oleh feminis muda, aktif, dan berbasis online (Lee dan Jeong, 2021).

### **People Power Party (PPP)**

People Power Party (Partai Kekuatan Rakyat) atau yang disingkat PPP, merupakan partai konservatif di Korea Selatan, dengan Lee Jun-seok sebagai ketua partai tersebut. PPP sempat mengalami kemunduran dalam elektabilitasnya sebagai dampak dari pemakzulan mantan presiden Park Geun-hye pada tahun 2016. Pemakzulan Park Geun-hye dipicu oleh kasus korupsi yang melibatkan dirinya dengan temannya yaitu Choi Soon-sil, yang memicu amarah masyarakat, sehingga masyarakat

menuntut Park Geun-hye untuk mundur dari jabatan presiden melalui protes massa secara besar-besaran. Park kemudian secara resmi digulingkat dari jabatannya pada Maret 2017. Dikarenakan skandal tersebut, PPP kehilangan kepercayaan dari masyarakat, mengingat Park Geun-hye berasal dari partai tersebut.

Mantan presiden Park Geun-hye mulai menjabat pada tahun 2013 hingga kemudian dimakzulkan pada tahun 2017. Di masa pemerintahannya, Park diduga melakukan korupsi yang melibatkan beberapa elit politik dan elit bisnis. Setelah pemakzulannya, Park kehilangan imunitas presidensialnya sehingga ia dituntut atas penyuaapan, penyalahgunaan kekuasaan negara, dan membocorkan rahasia negara, dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas kasus korupsi (BBC News, 2017).

PPP secara resmi dibentuk pada tahun 2020, dimana sebelum menjadi PPP, partai ini bernama Partai Saenuri. Partai Saenuri dibentuk pada tahun 2012 dengan ideologi konservatif, dimana Park Geun-hye menjadi salah satu anggota partai tersebut, bahkan menjadi Ketua Partai, dan kemudian mencalonkan diri menjadi Presiden Korea Selatan. Park Geun-hye resmi dilantik menjadi presiden pada bulan Februari 2013, hingga pada saat dirinya dimakzulkan pada tahun 2017 dikarenakan skandal korupsinya. Setelah pemakzulan Park, Partai Saenuri resmi berganti nama menjadi Liberty Korea Party pada tahun 2017, dengan Hong Jun-pyo yang diusung menjadi Calon Presiden Korea Selatan namun dikalahkan oleh Moon Jae-in dari Partai Demokrat, menjadikan Liberty Korea Party menjadi partai oposisi selama lima tahun pemerintahan Moon. Pada tahun 2020 Liberty Korea Party melakukan merger dengan United Future Party dan beberapa partai lainnya dan mengubah nama menjadi People Power Party, dan dikenal sebagai People Power Party atau PPP hingga saat ini<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Dikutip dari *official website* People Power Party, diterjemahkan oleh penulis.

## Rebranding PPP

Krisis yang dialami saat skandal korupsi Park Geun-hye hingga pemakzulannya sebagai Presiden, berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap Partai Saenuri yang menaungi Park. Skandal tersebut juga menyebabkan perpecahan yang terjadi di internal partai tersebut, yang mengarah pada berbagai upaya *rebranding* partai Saenuri. Skandal tersebut juga menyebabkan perpecahan yang terjadi di internal partai tersebut, yang pada akhirnya mengarah pada berbagai upaya *rebranding* partai Saenuri. Pihak yang mendukung pemakzulan membentuk Bareun Party, sementara sisanya yang masih bertahan di Saenuri melakukan *rebranding* terhadap partai tersebut menjadi Liberty Korea Party. Upaya partai konservatif ini untuk mengembalikan reputasinya dilakukan oleh Hong Jun-pyo, yang mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2017. Upaya kampanye Hong Jun-pyo adalah memobilisasi suara dari basis konservatif dan membentuk pandangan bahwa lawannya, Moon Jae-in dari Partai Demokrat adalah simpatisan komunis yang pro Korea Utara. Pada akhirnya, Hong dikalahkan oleh Moon dengan margin sebesar 17% (41% dan 24%) (Denney, 2019). Setelah kekalahannya tersebut, Hong memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pemimpin LKP sebagai bentuk tanggung jawabnya (Yoon, 2018). Partai konservatif ini kemudian kembali mengganti namanya menjadi People Power Party (PPP). Meskipun sudah berganti, tidak ada perubahan signifikan terhadap elektabilitas PPP.

Salah satu strategi rebranding PPP untuk mendapatkan kembali dukungan masyarakat adalah pemilihan Lee Jun-seok sebagai Ketua PPP, yang berusia 36 tahun ketika baru menjabat. Kemunculan Lee Jun-seok sebagai politisi muda dalam partai konservatif mendapat respon positif masyarakat, didukung juga oleh situasi dimana terdapat ketidakpuasan terhadap Presiden Moon Jae-in dari Partai Demokrat. Lee Jun-seok dikenal

sebagai politisi yang secara vokal menentang feminisme dan hak-hak perempuan. Sebagai dampaknya, banyak laki-laki muda yang anti feminis mendukung PPP, sehingga mampu menaikkan elektabilitas PPP dalam pemilu sela 2021.

## Penghapusan MOGEF

Yoon Seok-yeol terlihat aktif dalam mengkampanyekan penghapusan MOGEF sebagai misinya jika terpilih menjadi presiden Korea Selatan. Salah satu momen dimana Yoon Seok-yeol secara jelas mengkampanyekan isu tersebut adalah ketika ia membuat unggahan singkat berisikan janjinya untuk menghapus MOGEF di akun media sosialnya. Dalam unggahannya yang berbahasa Korea, Yoon menulis secara singkat '여성가족부 폐지'<sup>5</sup> yang diterjemahkan menjadi 'penghapusan MOGEF'. Yoon Seok-yeol menyebutkan bahwa ia melihat banyaknya kekecewaan masyarakat terhadap MOGEF karena gagal menjalankan perannya (The Korea Herald, 2021), yang menjadikan proposal penghapusan MOGEF sebagai janji kampanyenya sebelum pemilu berlangsung.

Unggahan singkat Yoon Seok-yeol ini menjadi sorotan di kancah politik, dan menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro terhadap kampanye penghapusan MOGEF ini menganggap dihapusnya MOGEF seperti 'mencabut gigi busuk', dimana MOGEF tidak menjalankan tugasnya dengan baik sehingga sudah seharusnya dihapus. Sedangkan dari sisi kontra menanggapi pihak oposisi mencoba untuk 'mencabut gigi yang belum tahu apakah busuk atau tidak', dimana jika memang MOGEF memiliki kekurangan, seharusnya ada upaya untuk mengisi kekurangan tersebut dan meningkatkan kinerja MOGEF.

Survei yang digarap oleh lembaga survei lokal Realmeter menunjukkan sebanyak 51,9% responden menyetujui penghapusan MOGEF, sementara 38,5% tidak menyetujui, dan 9,6% yang tersisa tidak memilih. Dari survei

<sup>5</sup> Dibaca 'yeosong-gajokbu pyeji'.

berdasarkan gender, 64% laki-laki meyetujui penghapusan MOGEF dan 29,8% menentang. Sementara itu, 40% perempuan menyetujui penghapusan MOGEF dan 47,1% (Jo, 2022). Data ini menunjukkan bagaimana penghapusan MOGEF lebih banyak disetujui oleh laki-laki dibandingkan perempuan.

### **Kemenangan PPP dalam Pemilu 2022**

Yoon Seok-yeol berhasil memenangkan Pemilu melawan Lee Jae-myung dari Partai Demokrat dengan margin yang begitu tipis. Dengan hasil tersebut, Yoon Seok-yeol kemudian resmi menjabat sebagai Presiden Korea Selatan. Meskipun penghapusan MOGEF menjadi kampanye Presiden Yoon Seok-yeol, selang satu tahun pemerintahannya – hingga penelitian ini ditulis – pemberitaan mengenai wacana tersebut jarang dibahas. Namun, pada bulan Oktober 2022, Yoon Seok-yeol memang sudah mengajukan penghapusan MOGEF ke Majelis Nasional. Dalam pengajuan penghapusan MOGEF, pemerintahan Yoon Seok-yeol mengalihkan tugas MOGEF ke kementerian-kementerian lain yang masih terkait jika MOGEF dihapus. Tugas Kementerian Gender akan dipindahkan ke Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan dalam unit baru, dimana kepala unit tersebut akan berposisi di antara Menteri dan Wakil Menteri. Sementara untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan perempuan akan dialihkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Meskipun begitu, pengajuan penghapusan MOGEF ini ditentang oleh Majelis Nasional, yang didominasi oleh Partai Demokrat. Anggota Parlemen Partai Demokrat memang mendukung sebagian besar perubahan, namun mereka sangat menentang penghapusan MOGEF. Mereka bahkan menuduh presiden Yoon menggunakan isu tersebut untuk menarik pemilih dari golongan laki-laki muda. Bagi Partai Demokrat dan kelompok-kelompok perempuan, penghapusan MOGEF dikhawatirkan dapat melemahkan upaya-upaya untuk mengatasi isu-isu kesetaraan gender dan kejahatan seksual (Lee, 2022).

Dalam upayanya untuk mengajukan proposal penghapusan MOGEF, pemerintahan Yoon Seok-yeol harus menerima fakta bahwa, berdasarkan survei yang dibuat oleh Gallup Korea pada bulan Oktober 2022, tingkat kepuasan masyarakat hanya mencapai 24%. Lambatnya progres Presiden Yoon dalam upaya penghapusan MOGEF menjadi salah satu faktor menurunnya tingkat kepuasan tersebut. Selain itu, ditolaknya proposal tersebut oleh Majelis Nasional juga menghambat terwujudnya penghapusan MOGEF. Presiden Yoon berada dalam posisi yang cukup tertekan, dimana jika ia tidak segera menghapus MOGEF, masyarakat akan semakin menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintahannya, sementara Majelis Nasional yang didominasi oleh Partai Demokrat menolak usulan tersebut dan menganggapnya sebagai strategi Yoon Seok-yeol dan PPP untuk mendapatkan lebih banyak suara dukungan.

### **PENUTUP**

Isu kesetaraan gender di Korea Selatan menjadi pembahasan yang masih menuai pro dan kontra di masyarakat hingga saat ini. Negara ini mendapati isu ketidaksetaraan gender yang kebanyakan merugikan perempuan. Salah satu faktor penyebab ketidaksetaraan gender di Korea Selatan dalam berbagai aspek adalah langgengnya patriarki dalam masyarakat. Isu ini kemudian memicu gerakan feminisme yang menuntut untuk kesetaraan bagi perempuan-perempuan Korea Selatan yang harus mengalami diskriminasi, salah satunya diskriminasi di tempat kerja. Meskipun adanya gerakan feminisme mendapatkan perhatian pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang ‘pro feminisme’, gerakan ini tidak sepenuhnya mendapat dukungan masyarakat. Dengan adanya tantangan terhadap gerakan feminisme di Korea Selatan, anti feminisme kemudian muncul sebagai countermovement atas feminisme. Gerakan anti feminisme menentang feminisme yang dianggap mendiskriminasi dan berupaya merebut hak-hak laki-laki, dimana mereka

menganggap bahwa kesejahteraan mereka yang seharusnya diprioritaskan oleh pemerintah.

Dengan mayoritas laki-laki muda yang mendukung anti feminisme di Korea Selatan, People Power Party (PPP) yang merupakan partai konservatif dan mengalami kemunduran selama beberapa tahun pemerintahan, melihat adanya celah untuk menarik perhatian dan dukungan. Selama melakukan rebranding, PPP menerapkan strategi yang sudah menargetkan golongan laki-laki muda yang tidak menginginkannya feminisme untuk semakin berkembang di Korea Selatan. Salah satu strategi yang digunakan PPP untuk menaikkan jumlah dukungan pada masa pemilu adalah dengan mengeluarkan wacana penghapusan MOGEF atau Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga sebagai kampanye utama partai mereka, dimana MOGEF dijanjikan untuk dihapus siapapun calon presiden yang mereka usung.

## Daftar Pustaka

### Artikel Berita

- Bahk, E. (2021). *Debate Arises over Gender Equality Ministry's Role*. The Korean Times. [https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/356\\_311786.html](https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/356_311786.html). Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.
- BBC News. (2017). *South Korea President Park Geun-hye Ousted by Court*. BBC. <https://www.bbc.com/news/world-asia-39202936>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2024.
- Denney, S. (2019). *South Korean Conservatives: What Now*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2019/02/south-korean-conservatives-what-now/>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2024.
- France24. (2021). *Anti-feminism Backlash on the Rise in South Korea*. France24. <https://www.france24.com/en/live-news/20210812-anti-feminism-backlash-on-the-rise-in-south-korea>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2021.
- Handayani, H.W. (2020). *The Nth Room: "Sexploitation" in Cyberspace*. Center for Digital

Society.

- <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/2020/09/08/the-nth-room-sexploitation-in-cyberspace/>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023.
- Jo, H. (2022). *Ministry for Feminists? Pledge to Abolish Gender Ministry Reignites Debate*. The Korea Herald. <https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220112000732>. Diakses pada tanggal 3 November 2023.
- Park, J. (2021). *Have South Korean Conservatives Made a Full Comeback*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2021/10/have-south-korean-conservatives-made-a-full-comeback/>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2023.
- Shin, M. (2021). *Can a 36-Year-Old Leader Transform South Korea's Conservative Party*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2021/07/can-a-36-year-old-leader-transform-south-koreas-conservative-party/>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2023.
- Yoon, C. (2018). *Defeat in Local Elections, Liberty Korea Party Leader Hong Jun-pyo Resigns*. No Cut News. <https://www.nocutnews.co.kr/news/4985408>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2024.
- Young, C. (2014). *Stop Fem-Splaining: What 'Women Against Feminism' Gets Right*. Time. <https://time.com/3028827/women-against-feminism-gets-it-right/>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

### Buku

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: SAGE Publications, Inc.
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.

### Jurnal

- Koh, E. (2008). *Gender Issues and Confucian Scriptures: Is Confucianism Incompatible with Gender Equality in South Korea?*. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 71, pp 345-362.
- Lee, J., Jeong, E. (2021). *The 4B movement: Envisioning a Feminist Future within a Non-*

*reproductive Future in Korea*. *Journal of Gender Studies*, 30(5), 633–644.  
<https://doi.org/10.1080/09589236.2021.1929097>

### **Website**

CEOP. *Online Grooming*.

[https://www.thinkuknow.co.uk/11\\_18/lets-talk-about/sexual-abuse/online-grooming](https://www.thinkuknow.co.uk/11_18/lets-talk-about/sexual-abuse/online-grooming). Diakses pada tanggal 25 Januari 2024.

MOGEF. *History*.

[https://www.mogef.go.kr/eng/am/eng\\_am\\_f005.do](https://www.mogef.go.kr/eng/am/eng_am_f005.do). Diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

People Power Party.

<https://www.peoplepowerparty.kr/about/history>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2024.

Woon, Y. (2020). *Harsher Punishment and Stronger Protection against Digital Sex Crimes*.

MOGEF.

[https://www.mogef.go.kr/eng/pr/eng\\_pr\\_s101d.do?mid=eng001&bbtSn=707003](https://www.mogef.go.kr/eng/pr/eng_pr_s101d.do?mid=eng001&bbtSn=707003). Diakses pada tanggal; 25 Januari 2024.